Katalog: 9302001.8202

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MENURUT LAPANGAN USAHA

2016

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MENURUT LAPANGAN USAHA

2016

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 2016

ISBN: 978-602-662-109-2
No. Publikasi: 82020.1701
Katalog: 9302008.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: xv + 124 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:
Potensi Kabupaten Halmahera Tengah

Sumber Ilustrasi*:*
http://www.freepik.com/

Diterbitkan oleh:

Dicetak oleh:
CV. Tara Taru

KATA PENGANTAR
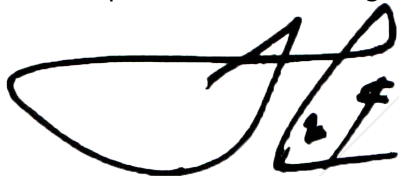
Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Tengah 2016 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah secara deskriptif. Dalam publikasi ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2010–2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan Tahun Dasar 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan publikasi ini mendatang.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Weda , Agustus 2017

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan SST, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai "Sistem Neraca Nasional". Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.

.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa

Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

8. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan

harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Provinsi dan Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;

- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[1];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

[1] SNA1993, para 16.76: "*constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing*"

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR)**:

  Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- **Metodologi** : **Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).**

- **Valuasi : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).**

  Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi :**

  Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) .	Menggunakan metode *Financial Intermediary Services Indirectly Measured* (FISIM)
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010
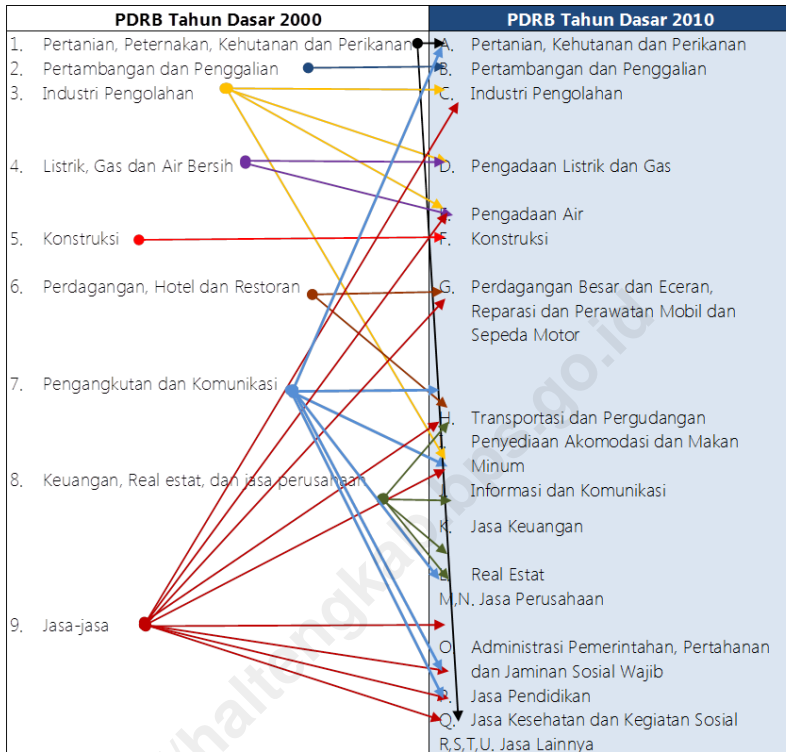
Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS

dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah

tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk

berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas

dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada

periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi; Subdit Statistik Kehutanan BPS dan Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan

diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat penen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*Standing Crops*) di akhir periode

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*Standing Crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi. gas dan panas bumi.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau

memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan. Di Kabupaten Halmahera Tengah belum ada kegiatan pertambangan batubara dan lignit.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangaan, krom, nikel

kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDRB triwulanan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan

berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter,

lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19. Namun di Kabupaten Halmahera Tengah belum terdapat industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot

(snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12. Subkategori ini tidak terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper,

tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15. Subkategori ini tidak terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet,

termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22. Subkategori ini tidak terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan

perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk

angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan

penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS dan Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi maupun Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Stastistik BPS Provinsi.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas

dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan

NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi

meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini

mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/ minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada

masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Estimasi PDRB triwulanan menggunakan survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi maupun Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak

tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/ Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah Subdit Statistik Pertambangan dan Energi BPS, APBD (BAPPEDA), APBN (Kemenkeu), Survei Tahunan Air Bersih dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru,

perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya

serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Ouput harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi survei konstruksi BPS dan hasil Sensus Ekonomi 2006 serta data realisasi pengeluaran pembangunan fisik pemerintah baik Provinsi, kabupaten/kota maupun desa dan juga dari sumber lain baik itu pemerintah maupun swasta berupa dari kantor penanaman modal, dinas PU, tata kota

asosiasi perusahaan-perusahaan konstruksi dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan

pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku

cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri.

Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-*deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei khusus lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS maupun Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos

dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Di Kabupaten Halmahera Tengah belum terdapat kegiatan angkutan rel.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaran wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kantor SAMSAT. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari beberapa perusahaan angkutan darat yang ada di provinsi dan kabupaten/kota dan hasil survei khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu

kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan angkutan laut.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata

output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT ASDP Indonesia Ferry.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi.Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional.Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia), Bandara Sultan Baabullah Ternate. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan jasa penunjang angkutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010.

Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I, PT Pelabuhan Indonesia IV, dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk

penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 BPS serta Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi . Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan,

elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara,

data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara

output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi seperti: PT Telkom, Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk Bank Komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk Bank Sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan

atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output Bank Sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-

resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS serta Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS serta Survei Khusus yang dilakukan oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat

Statistik Harga Konsumen BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, Subdirektorat Statistik Keuangan BPS serta Survei Khusus yang dilakukan oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi . Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan

dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian,

perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum

digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal

diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m^2. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah), Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar,

serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan

perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta survei khusu yang dilakukan oleh Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks

tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional.

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Dinas Pendidikan; Kanwil Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional;

Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Dinas Kesehatan Provinsi; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS serta Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen dan Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan

Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Pariwisata, data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran serta Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi.

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen) dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat

Neraca Produksi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi.

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga

yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

III. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

3.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Indikator ini merupakan informasi penting untuk mengetahui kategori lapangan usaha yang merupakan penopang utama perekonomian di suatu wilayah. Penyajian indikator struktur ekonomi dari waktu ke waktu dapat menunjukkan ada tidaknya perubahan struktur perekomian di suatu wilayah.

Tabel / *Table* 3.1 **Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016**
Share of GDP by Industry (percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishing*	25,08	24,94	26,94	26,71	25,45
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	26,15	25,12	17,50	15,10	13,79
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	2,49	2,49	2,69	2,70	8,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi/*Construction*	7,24	7,19	7,89	8,19	7,74

Lanjutan Tabel 3.1

	Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	12,40	13,34	14,96	15,93	14,96
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	1,26	1,32	1,51	1,62	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,21	0,21	0,22	0,22	0,20
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	1,48	1,53	1,78	1,80	1,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	2,21	2,29	2,45	2,45	2,33
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	17,69	17,82	20,03	21,17	19,92
P	Jasa Pendidikan/*Education*	2,16	2,09	2,21	2,21	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	1,30	1,34	1,47	1,53	1,45
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

** Angka sementara/Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Perekonomian masyarakat Halmahera Tengah masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebanyak 25,45 persen nilai tambah dari aktivitas perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 disumbangkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Peranan kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berperan 25,08 persen terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 24,94 persen. Pengurangan peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini diikuti oleh meningkatnya peranan lapangan usaha sekunder dan tersier (Industri, perdagangan dan jasa-jasa).

Gambar 3.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016

Figure Share of GDRP by Industry (percent), 2016
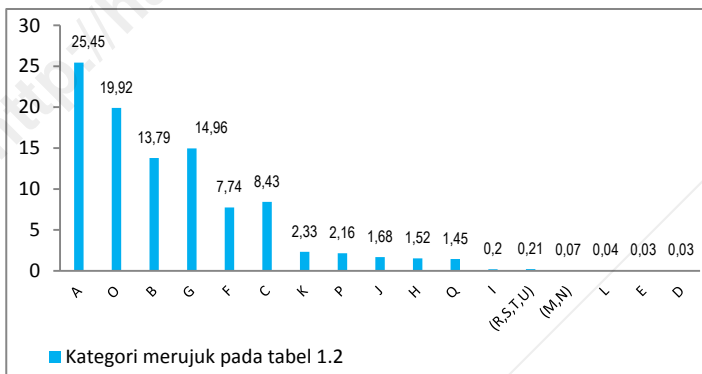
Kategori yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah berikutnya adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori Pertambangan dan Penggalian. Peranan keempat kategori perekonomian tersebut mencapai lebih dari 60 persen.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan yang diwujudkan dengan meningkatnya pendapatan nasional.

Tabel / *Table* 3.2 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012–2016
Real Growth Rate of GRDP by Industrial Origin (percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry and Fishing*	5,40	3,35	3,26	2,61	2,74
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	2,16	2,20	(28,47)	(3,96)	1,42

Lanjutan Tabel 3.2...

	Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	**3,01**	**6,99**	**8,56**	**5,36**	**280,06**
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	**(6,10)**	**10,73**	**17,62**	**17,82**	**24,63**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/*Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities*	**3,79**	**3,44**	**4,50**	**1,28**	**0,16**
F	Konstruksi/*Construction*	**12,34**	**4,79**	**6,81**	**6,94**	**4,02**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	**7,18**	**12,82**	**10,87**	**9,83**	**4,09**
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	**7,75**	**6,87**	**8,26**	**8,55**	**4,32**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	**3,13**	**3,83**	**2,42**	**2,47**	**3,34**
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	**6,65**	**8,79**	**10,57**	**8,78**	**4,68**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	**3,90**	**9,31**	**6,45**	**5,96**	**5,86**
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	**5,50**	**4,66**	**5,99**	**6,05**	**2,84**
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	**4,38**	**7,33**	**5,89**	**5,91**	**5,79**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	**4,50**	**6,55**	**9,46**	**7,63**	**2,85**
P	Jasa Pendidikan/*Education*	**4,90**	**3,84**	**5,52**	**5,76**	**3,74**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	**5,99**	**8,49**	**7,61**	**8,14**	**4,75**
R,S,T,U	Jasa lainnya/*Other Services Activities*	**4,85**	**3,08**	**5,55**	**5,89**	**5,96**
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		**5,02**	**5,29**	**(1,90)**	**4,34**	**11,25**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Secara agregat kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah mengalami kondisi yang fluktuatif sejak tahun 2012, yaitu 5,02 persen menjadi 5,29 persen pada tahun setelahnya, kemudian menjadi -1,90 persen pada tahun 2014, tahun 2015 meningkat kembali menjadi 4,31 persen. Dan tahun 2016 meningkat tajam menjadi 11,25 Persen. Hal tersebut karena kategori Industri Pengolahan mencapai pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan kategori lainnya yaitu sebesar 280,49 persen. Pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh mulai beroperasinya Smelter untuk mengolah Bijih Nikel yang telah ditambang pada perusahaan pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe, kemudian hasilnya diekspor keluar negeri[2].

Bila dilihat perkategori, pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah Industri Pengolahan pada tahun 2016 dicapai oleh Pengadaan listrik dan gas yaitu tumbuh sebesar 24,63 persen. Kemudian kategori Jasa lainnya tumbuh sebesar 5,96 persen serta kategori Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh dengan pertumbuhan sebesar 5,86 persen

---

[2] *Ekspor awal tahun 2016 bijih nikel setengah jadi (pig Iron) sejumlah 10.400 metrik ton dilakukan oleh PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN) di Kecamatan Pulau Gebe. Tujuan ekspor ke Tiongkok. Kadar nikel pada pig iron tersebut sebesar 8,433 persen .Sampai saat ini smelter untuk memproduksi nikel pig iron masih menggunakan 4 tungku. Ke depan perusahaan akan menambah hingga 12 tungku. Income yang masuk ke negara sebesar USD 588.000 atau sekitar 80 M Rupiah.*

Pertumbuhan kategori lapangan sekunder (kategori Industri Pengolahan hingga konstruksi) pada tahun 2016 mampu tumbuh di atas 5 persen. Sedangkan kategori yang termasuk dalam sektor primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan maupun kategori lapangan usaha tersier yaitu mulai kategori Perdagangan Besar dan Eceran hingga Jasa Lainnya masing masing hanya mampu tumbuh 2,21 persen dan 3,68 persen.

3.3 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB per kapita secara kasar dapat digunakan sebagai pendekatan indikator pendapatan per kapita yang mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, secara ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakat tersebut.

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita Kabupaten Halmahera Tengah (Juta Rp), 2011–2016**

Figure Per Capita GRDP of Maluku Utara Province (Million Rp), 2011–2016*
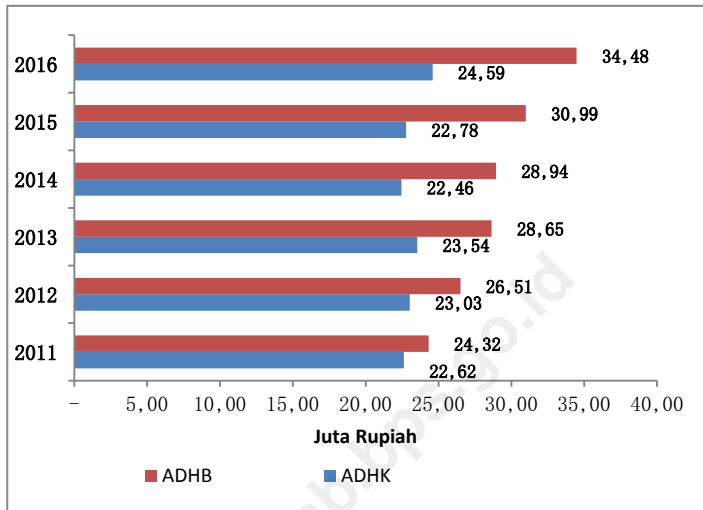
Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 34,48 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 11,26 persen. Rata-rata PDRB (ADHB) per kapita Kabupaten Halmahera Tengah tumbuh 7,29 persen dalam periode 2011-2016. Sedangkan bila berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun dasar 2010,, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 sebesar 24,59 juta rupiah. Bila tanpa mempertimbangkan perubahan harga, rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK selama 4 tahun terakhir tumbuh sekitar 1,76 persen tiap tahun.

IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kabupaten Halmahera Tengah menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

4.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Gambar 4.1 **PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah (Miliar Rupiah), 2011-2016**

Figure ***Gross Domestic Regional Product from Categories of Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Service at Central Halmahera Regency (Billion Rp), 2011–2016***
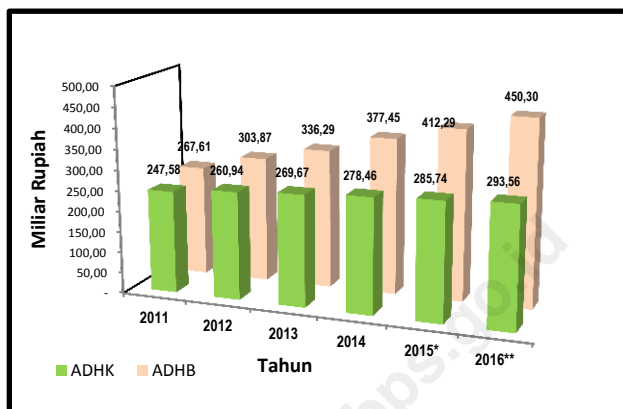
Pada tahun 2016 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 25,45 persen. Golongan Tanaman Perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 37,505 persen dari seluruh nilai tambah kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kemudian subkategori Perikanan yang berkontribusi sebesar 28,73 persen terhadap total nilai tambah pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi golongan Tanaman Perkebunan terhadap nilai tambah kategori pertanian tahun 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015. Namun sebaliknya, kontribusi subkategori

Tanaman Hortikultura baik semusim maupun tahunan justru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Seluruh subkategori dan golongan di kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencetak laju pertumbuhan yang positif di tahun 2016. Subkategori yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada subkategori Jasa Pertanian dan Perburuan yaitu sebesar 5,94 persen.Sedangkan Sub Kategori yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Sub kategori Kehutanan dan Penebangan kayu yaitu hanya tumbuh sebesar 1,23 persen.

4.2 Pertambangan dan Penggalian

Kegiatan kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh subkategori Pertambangan Bijih Logam, dengan kontribusi sebesar 99,4 persen pada tahun 2015, menurun dari 99,5 persen di tahun 2014. Sedangkan subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya hanya berkontribusi 0,57 persen di tahun 2015.

Tabel 4.1 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2012-2016

Table Share of Mining and Quarrying by Industry (Percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/*Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal*	-	-	-	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/*Coal and Lignite Mining*	-	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam/*Iron Ore Mining*	99,71	99,69	99,50	99,38	99,31
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/*Other Mining and Quarrying*	0,29	0,31	0,50	0,62	0,69
	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Secara keseluruhan pada tahun 2016, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat sebesar 1,42 persen. Sejalan dengan mulai beroperasinya smelter pada perusahaan tambang di Kecamatan Pulau Gebe.

Gambar / *Figure*	4.2	**Peranan Lapangan Usaha Kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (Persen), 2011-2016** ***Share of Mining and Quarrying by Industry (Percent), 2011-2016***
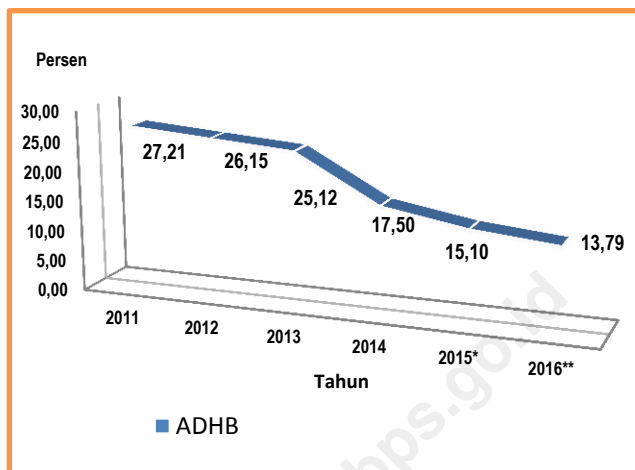
4.3 Industri Pengolahan

Pada Tahun 2016 Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi oleh dua subkategori utama yaitu subkategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya serta subkategori Industri Logam dasar. Rata-rata peranan kedua subkategori ini terhadap nilai tambah kategori Industri Pengolahan mencapai 92,95 persen. Kontribusi Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,

Rotan dan Sejenisnya yaitu sebesar 21,61 persen, sedangkan subkategori Industri Logam dasar sebesar 71,34 persen.

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2016 sebesar 280,06 persen, laju pertumbuhan yang cukup tinggi ini terutama disebabkan karena adanya NTB Sub Kategori yang baru yaitu Sub Kategori Industri Logam Dasar. Dimana NTB Industri logam dasar berjumlah sekitar 106,4 Miliar Rupiah.

Tabel 4.3 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen), 2012-2016

Table 4.3 Share of Manufacturing by Industry (Percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/*Manufacture of Coal and Refned Petroleum Products*	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman/*Manufacture of Food Products and Beverages*	18,83	18,94	19,23	20,43	6,13
3	Industri Pengolahan Tembakau/*Manufacture of Tobacco Products*	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/*Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel*	0,39	0.37	0,38	0,40	0,13
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/*Manufacture of Leather and Related Products and Footwear*	-	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ *Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials*	78,11	78,09	77,79	76,53	21,61

Lanjutan Tabel 4.3

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/*Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media*	-	-	-	-	-
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/*Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products*	0,07	0,07	0,06	0,06	0,02
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/*Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products*	-	-	-	-	-
10	Industri Barang Galian bukan Logam/*Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products*	0,80	0,79	0,75	0,72	0,22
11	Industri Logam Dasar/*Manufacture of Basic Metals*	-	-	-	-	71,34
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/*Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, ande Electrical Equipment*	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
13	Industri Mesin dan Perlengkapan /*Manufacture of Machinery and Equipment*	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan/*Manufacture of Transport Equipment*	0,40	0,39	0,38	0,37	0,12
15	Industri Furnitur/*Manufacture of Furniture*	1,13	1,11	1,15	1,21	0,35
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/*Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment*	0,22	0,21	0,21	0,23	0,07
	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Penyediaan listrik merupakan salah satu aspek ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah. Keberadaan listrik sangat penting sebagai penunjang kegiatan perekonomian. Meskipun sangat penting, kontribusi Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Halmahera Tengah relatif kecil. Kategori ini berkontribusi sebesar 0,03 persen terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016.

Tabel / ***Table*** **4.3** **Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012-2016**

Share of Electricity and Gas by Industry (Percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/*Industry*	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016****
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ketenagalistrikan/*Electricity*	91,61	91,50	92,31	93,23	94,62
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es/*Manufacture of Gas and Production of Ice*	8,39	8,50	7,69	6,77	5,38
Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Dari seluruh nilai tambah Kategori Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2016, sebagian besar (94,62 persen) disumbangkan oleh subkategori Ketenagalistrikan, sedangkan sisanya 5,38 persen oleh subkategori Pengadaan Gas dan

Produksi Es. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2016 cukup tinggi yaitu 24,63 persen. Hal ini ditopang oleh Subkategori Ketenagalistrikan yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 25,57 persen serta subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es yang tumbuh sebesar 8,76 persen.

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan penditribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2011-2016 rata-rata sebesar 0,03 persen. Laju pertumbuhan kategori ini sejak tahun 2011 sampai 2016 rata rata tumbuh di atas 2 persen.

4.6 Konstruksi

Gambar **PDRB Kategori Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah (Miliar Rupiah), 2011-2016**

Figure* 4.3** ***Gross Domestic Regional Product from Categories of Construction at Central Halmahera Regency (Billion Rp), 2011–2016
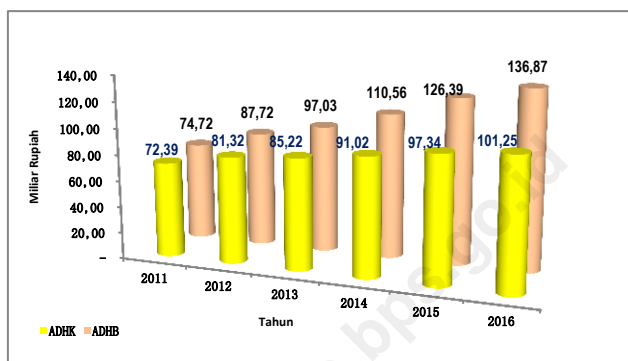
Pada tahun 2016, kategori konstruksi berkontribusi sebesar 7,74 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah, lebih kecil dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 8,19 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah tetap mengalami pertumbuhan positif dari 6,94 persen pada tahun 2015 menjadi 4,02 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan ini tetap didorong oleh peningkatan aktivitas konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun rumah tangga.

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori terbesar ketiga penyumbang perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah setelah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel / ***Table*** **4.4** **Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2012-2016****

Share of Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles by Industry (Percent), 2012–2016**

	Lapangan Usaha/*Industry*	**2012**	**2013**	**2014**	**2015***	**2016****
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/*Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	2.80	2,72	2.74	2.75	2.83
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles*	97.20	97.28	97.26	97.25	97.17
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi rata-rata di atas 14 persen. Kontribusi kategori ini tiap tahunnya menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini mencapai 14,96 persen, dimana sebesar 14,54 persen disumbangkan oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan sisanya sebesar 0,42 persen disumbangkan oleh subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Besarnya peranan PDRB kategori lapangan usaha perdagangan, didominasi oleh subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, yang menyumbang PDRB kategori Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata 97,23 persen per tahun selama periode tahun 2012-2016. Sedangkan peranan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya rata-rata hanya sebesar 2,77 persen.

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini menyumbang 1,52 persen terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016. Bila dirinci per subkategori, Angkutan Darat memberikan kontribusi terbesar terhadap kategori Transportasi dan Pergudangan, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 78,08 persen pada tahun 2016. Sedangkan penyumbang terbesar berikutnya adalah Pergudangan dan Jasa penunjang angkutan sebesar 9,82 persen.

Tabel 4.5 **Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012-2016**

Table ***Share of Transportation and Storage by Industry (Percent), 2012–2016***

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Angkutan Rel/*Railways Transport*	-	-	-	-	-
2	Angkutan Darat/*Land Transport*	75,88	76,96	77,83	78,97	78,08
3	Angkutan Laut/*Sea Transport*	7,15	6,55	6,39	6,29	6,59
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/*River, Lake, and Ferry Transport*	0,46	0,48	0,49	0.47	0,50
5	Angkutan Udara/*Air Transport*	5,47	5,58	5,44	4,93	5,00
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/*Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier*	11,05	10,43	9,86	9,33	9,82
	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Kategori Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2016 tumbuh 4,32 persen, lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 (8,55 persen). Subkategori yang tumbuh paling cepat di tahun 2016 yaitu subkategori Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang tumbuh sebesar 10,91 persen.

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,20 persen, di mana sebesar 0,09

persennya merupakan kontribusi dari subkategori Penyediaan Akomodasi dan sebesar 0,12 persen disumbangkan oleh subkategori Penyediaan Makan Minum.

Tabel / *Table* **4.6** **Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2012-2016**

Share of Accomodation and Food Service Activities by Industry (Percent), 2012–2016

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan Akomodasi/*Accommodation*	44,21	42,98	43,19	42,89	42,42
2	Penyediaan Makan Minum/*Food and Beverage Service Activities*	55,79	57,02	56,81	57,11	57,58
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	**100.00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Walaupun berperan di bawah 1 persen bagi perekonomian Halmahera Tengah, akan tetapi, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,34 persen pada tahun 2016, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 2,47 persen. Masing-masing subkategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum juga menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2016 sebesar 3,62 persen dan 3,10 persen.

Gambar **4.4** **Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2012-2016****

Figure ***Growth Rate of Accomodation and Food Service Activities by Industry (Percent), 2012-2016***
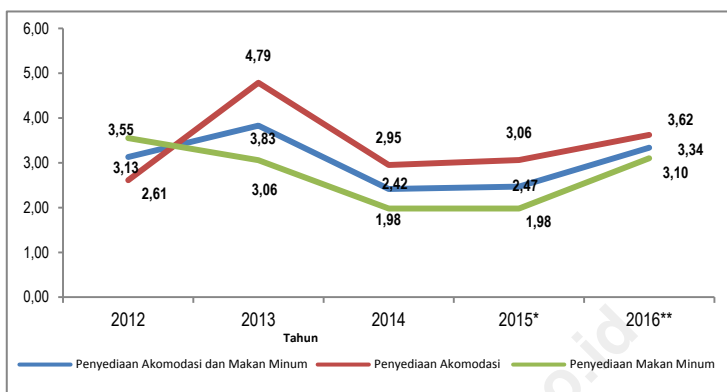
4.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2016 sebesar 1,68 persen. Sedangkan laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2016 meningkat dengan cukup tinggi yaitu sebesar 4,68 persen.

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki peran penting terhadap perekonomian. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi terdiri dari 4 subkategori yaitu Jasa Perantara Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan.

Kegiatan ekonomi pada subkategori Jasa Perantara Keuangan menjadi penyumbang mayoritas kontribusi perekonomian pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi ini. Selama tahun 2011-2015, kontribusinya mendominasi rata-rata 92.5 persen terhadap nilai tambah kategori Jasa Keuangan dan Asuransi KAbupaten Halmahera Tengah. Penyumbang terbesar berikutnya dalah subkategori Asuransi dan Dana Pensiun pada kisaran di atas 6,3 persen.

Laju pertumbuhan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun 2015 sebesar 5,96 persen, melambat bila dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 6,45 persen. Melambatnya kinerja kategori ini disebabkan oleh subkategori Jasa Perantara Keuangan yang tumbuh 5,71 persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2014 (6,45 persen).

Tabel 4.7 **Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012-2016**

Table ***Share of Financial and Insurance Activities by Industry (Percent), 2012–2016***

	Lapangan Usaha/*Industry*	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jasa Perantara Keuangan/*Financial Intermediary Services*	92,74	92,80	92,37	91,86	91,45
2	Asuransi dan Dana Pensiun/*Insurance and Pension Fund*	5,98	5,99	6,42	6,91	7,29
3	Jasa Keuangan Lainnya/*Other Financial Services*	1,17	1,10	1,10	1,12	1,15
4	Jasa Penunjang Keuangan/*Financial Supporting Service*	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

4.12 Real Estat

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah dengan peranan sebesar 0,04 persen sejak tahun 2012 sampai tahun 2016. Bila ditinjau dari laju pertumbuhannya, kategori ini tahun 2016 tetap tumbuh positif sebesar 2,84 persen.

4.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan memiliki cakupan kegiatan yang luas dan beragam. Kegiatan profesional, ilmu

pengetahuan dan teknik ; dan kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, agen penunjang perjalanan dan penunjang usaha lainnya dicakup dalam kategori ini.

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu sekitar 0,07 persen untuk tahun 2012-2016. Sedangkan pada tahun 2016 laju pertumbuhannya tetap mengalami peningkatan positif yaitu sebesar 5,79 persen.

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Kategori ini merupakan penopang perekonomian kedua setelah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012 sampai 2016 secara rata-rata mencapai 19,33 persen per tahun. Laju pertumbuhan kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,85 persen pada tahun

2016. Sedangkan rata-rata pertumbuhan tahunannya sebesar 6,20 persen selama periode tahun 2012-2016.

4.15 Jasa Pendidikan

Aktifitas perekonomian pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB kategori Jasa Pendidikan. Secara rata-rata selama tahun 2012-2016, kategori Jasa Pendidikan menyumbang sebesar 2,17 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah mengalami tetap peningkatan dari 5,76 persen pada tahun 2015 menjadi 3,74 persen pada tahun 2015. Sementara pertumbuhan per tahun rata-rata mencapai 4,75 persen dalam periode waktu 2012-2016.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2012-2016, peranan kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,42 persen, dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,99 persen tiap tahun dalam periode tahun 2012-2016. Sedangkan pada tahun

2016, kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,45 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,75 persen.

4.17 Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah relatif kecil yaitu mencapai 0,20 persen per tahun selama tahun 2012-2016, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,07 persen dalam kurun waktu 2012-2016. Sedangkan pada tahun 2016, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 5,96 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,89 persen.

lampiran

Lampiran 1. PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	238.348,46	267.610,35	303.874,00	336.294,97
B	Pertambangan dan Penggalian	263.149,71	293.145,30	316.902,02	338.744,21
C	Industri Pengolahan	25.998,83	27.727,96	30.202,22	33.613,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	215,01	238,08	214,27	218,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	280,32	305,14	333,71	364,01
F	Konstruksi	66.096,65	74.722,80	87.716,70	97.031,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111.435,23	124.974,60	150.234,68	179.904,49
H	Transportasi dan Pergudangan	12.882,75	13.799,05	15.267,74	17.787,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.054,44	2.205,07	2.487,04	2.792,70
J	Informasi dan Komunikasi	13.929,70	16.283,20	17.939,05	20.586,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.582,44	23.018,21	26.783,30	30.837,94
L	Real Estate	398,13	439,13	474,24	511,36
M,N	Jasa Perusahaan	691,97	736,05	792,78	870,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	161.507,28	191.803,65	214.359,75	240.302,29
P	Jasa Pendidikan	21.941,50	24.164,60	26.191,83	28.196,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.837,79	14.221,25	15.798,08	18.016,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.842,49	1.998,45	2.264,72	2.530,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		952.192,68	1.077.392,91	1.211.836,12	1.348.604,24

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lanjutan lampiran 1.

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	377.453,08	412.290,95	450.301,96
B	Pertambangan dan Penggalian	245.177,87	233.108,91	244.025,79
C	Industri Pengolahan	37.725,29	41.603,56	149.139,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	265,41	354,02	534,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	391,75	414,83	448,27
F	Konstruksi	110.562,76	126.388,68	136.868,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	209.633,71	245.940,59	264.718,73
H	Transportasi dan Pergudangan	21.092,28	25.002,57	26.934,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.092,94	3.329,96	3.624,03
J	Informasi dan Komunikasi	24.974,69	27.856,67	29.752,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	34.301,40	37.843,07	41.221,46
L	Real Estate	549,29	595,57	626,62
M,N	Jasa Perusahaan	955,64	1.060,23	1.194,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.656,14	326.792,32	352.406,73
P	Jasa Pendidikan	30.906,71	34.075,46	38.220,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.604,24	23.559,42	25.617,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.895,73	3.280,08	3.662,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.401.238,93	1.543.496,90	1.769.299,60

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lampiran 2. PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	238.348,46	247.575,27	260.939,05	269.668,25
B	Pertambangan dan Penggalian	263.149,71	268.646,43	274.442,22	280.481,87
C	Industri Pengolahan	25.998,83	26.552,86	27.351,48	29.262,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	215,01	259,89	244,04	270,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	280,32	291,32	302,37	312,76
F	Konstruksi	66.096,65	72.386,72	81.321,71	85.220,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	111.435,23	117.412,22	125.841,54	141.978,79
H	Transportasi dan Pergudangan	12.882,75	13.503,27	14.549,41	15.549,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.054,44	2.120,52	2.186,91	2.270,64
J	Informasi dan Komunikasi	13.929,70	14.914,41	15.905,72	17.303,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.582,44	21.517,10	22.355,52	24.435,84
L	Real Estate	398,13	424,14	447,48	468,31
M,N	Jasa Perusahaan	691,97	723,99	755,68	811,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	161.507,28	176.946,96	184.902,21	197.009,95
P	Jasa Pendidikan	21.941,50	23.445,53	24.594,99	25.538,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.837,79	13.642,81	14.459,55	15.687,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.842,49	1.895,55	1.987,42	2.048,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		952.192,68	1.002.258,98	1.052.587,28	1.108.318,14

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lanjutan lampiran 2.

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	278.458,22	285.738,12	293.555,33
B	Pertambangan dan Penggalian	200.618,251	192.677,08	195.416,51
C	Industri Pengolahan	31.767,20	33.470,42	127.206,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	317,85	374,48	466,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	326,83	331,03	331,57
F	Konstruksi	91.021,76	97.339,71	101.250,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	157.416,73	172.889,07	179.967,95
H	Transportasi dan Pergudangan	16.832,78	18.272,58	19.061,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.325,49	2.382,92	2.462,49
J	Informasi dan Komunikasi	19.132,09	20.812,84	21.787,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26.013,17	27.563,51	29.179,04
L	Real Estate	496,34	526,38	541,33
M,N	Jasa Perusahaan	858,86	909,61	962,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	215.644,14	232.098,01	238.703,75
P	Jasa Pendidikan	26.949,78	28.500,76	29.566,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.881,38	18.254,90	19.121,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.162,30	2.289,62	2.426,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1.087.223,19	1.134.431,04	1.262.007,71

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lampiran 3. Distribusi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,03	24,84	25,08	24,94
B	Pertambangan dan Penggalian	27,64	27,21	26,15	25,12
C	Industri Pengolahan	2,73	2,57	2,49	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,94	6,94	7,24	7,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,70	11,60	12,40	13,34
H	Transportasi dan Pergudangan	1,35	1,28	1,26	1,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,20	0,21	0,21
J	Informasi dan Komunikasi	1,46	1,51	1,48	1,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	2,14	2,21	2,29
L	Real Estate	0,04	0,04	0,04	0,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,96	17,80	17,69	17,82
P	Jasa Pendidikan	2,30	2,24	2,16	2,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,32	1,30	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,19	0,19	0,19	0,19
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lanjutan lampiran 3.

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,94	26,71	25,45
B	Pertambangan dan Penggalian	17,50	15,10	13,79
C	Industri Pengolahan	2,69	2,70	8,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,89	8,19	7,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,96	15,93	14,96
H	Transportasi dan Pergudangan	1,51	1,62	1,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,22	0,20
J	Informasi dan Komunikasi	1,78	1,80	1,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,45	2,45	2,33
L	Real Estate	0,04	0,04	0,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,03	21,17	19,92
P	Jasa Pendidikan	2,21	2,21	2,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,53	1,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,21	0,21	0,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,87	5,40	3,35
B	Pertambangan dan Penggalian	2,09	2,16	2,20
C	Industri Pengolahan	2,13	3,01	6,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,87	(6,10)	10,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,93	3,79	3,44
F	Konstruksi	9,52	12,34	4,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	7,18	12,82
H	Transportasi dan Pergudangan	4,82	7,75	6,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,22	3,13	3,83
J	Informasi dan Komunikasi	7,07	6,65	8,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,79	3,90	9,31
L	Real Estate	6,53	5,50	4,66
M,N	Jasa Perusahaan	4,63	4,38	7,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,56	4,50	6,55
P	Jasa Pendidikan	6,85	4,90	3,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,27	5,99	8,49
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,88	4,85	3,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,26	5,02	5,29

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lanjutan lampiran 4.

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,26	2,61	2,74
B	Pertambangan dan Penggalian	(28,47)	(3,96)	1,42
C	Industri Pengolahan	8,56	5,36	280,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,62	17,82	24,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,50	1,28	0,16
F	Konstruksi	6,81	6,94	4,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,87	9,83	4,09
H	Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,55	4,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,47	3,34
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	8,78	4,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,45	5,96	5,86
L	Real Estate	5,99	6,05	2,84
M,N	Jasa Perusahaan	5,89	5,91	5,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,46	7,63	2,85
P	Jasa Pendidikan	5,52	5,76	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,61	8,14	4,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,55	5,89	5,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(1,90)	4,34	11,25

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Indeks Implit PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,09	7,74	7,09
B	Pertambangan dan Penggalian	9,12	5,82	4,59
C	Industri Pengolahan	4,43	5,74	4,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(8,39)	(4,16)	(7,92)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	5,37	5,46
F	Konstruksi	3,23	4,49	5,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	12,16	6,14
H	Transportasi dan Pergudangan	2,19	2,69	9,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,99	9,36	8,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,18	3,30	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,98	11,99	5,34
L	Real Estate	3,54	2,36	3,03
M,N	Jasa Perusahaan	1,67	3,19	2,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,40	6,95	5,21
P	Jasa Pendidikan	3,07	3,32	3,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,24	4,81	5,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,43	8,09	8,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,50	7,10	5,69

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Lanjutan lampiran 5.

Kategori	Uraian	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,70	6,45	6,31
B	Pertambangan dan Penggalian	1,19	(1,00)	3,22
C	Industri Pengolahan	3,38	4,67	(5,68)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,29	13,21	21,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,99	4,55	7,88
F	Konstruksi	6,68	6,89	4,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	6,82	3,40
H	Transportasi dan Pergudangan	9,54	9,20	3,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,14	5,07	5,31
J	Informasi dan Komunikasi	9,72	2,53	2,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,49	4,12	2,90
L	Real Estate	1,35	2,24	2,31
M,N	Jasa Perusahaan	3,71	4,76	6,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	8,18	4,85
P	Jasa Pendidikan	3,87	4,25	8,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,27	5,74	3,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,42	6,97	5,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,92	5,57	3,04

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
JL. Poros Weda Payahe
Email : bps8202@mailhost.bps.go.id
Homepage : haltengkab.bps.go.id

9 786026 621092